



# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT NERACA PRODUKSI



20  
25



**BADAN PUSAT STATISTIK**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Neraca Produksi merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Direktorat Neraca Produksi. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja Direktorat Neraca Produksi.

Laporan Kinerja Direktorat Neraca Produksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, penggunaan sumber daya, pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang diperoleh, serta komitmen dari pimpinan dan seluruh staf di Direktorat Neraca Produksi.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Saran untuk perbaikan laporan ini di masa mendatang sangat kami hargai.

Jakarta, 19 Januari 2026

Direktur Neraca Produksi



Puji Agus Kurniawan

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi .....	2
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran .....	3
1.4. Potensi dan Permasalahan .....	5
1.5. Sistematika Penyajian Laporan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
2.1. Visi dan Misi BPS .....	9
2.1.1. Visi Direktorat Neraca Produksi .....	10
2.1.2. Misi Direktorat Neraca Produksi .....	11
2.1.3. Tujuan Direktorat Neraca Produksi .....	12
2.1.4. Sasaran Strategis Direktorat Neraca Produksi.....	15
2.2. Target Kinerja Direktorat Neraca Produksi 2025-2029.....	20
2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025 .....	22
2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	23
2.4.1. Prioritas Nasional: Pembinaan Statistik Sektoral .....	23
2.4.2. Prioritas Presiden: Makan Bergizi Gratis .....	24
2.4.3. Isu Strategis Nasional: Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK .....	26
2.5. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	30
3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025 .....	30
3.2. Capaian Kinerja Direktorat Neraca Terhadap Target Renstra .....	37

3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 .....	39
3.3.1 Capaian Prioritas Nasional .....	39
3.3.2 Capaian Prioritas Presiden .....	41
3.3.3 Capaian Isu Strategi Nasional .....	44
3.4. Prestasi dan Inovasi Direktorat Neraca Produksi .....	46
3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Direktorat Neraca Produksi.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Rencana Tindak Lanjut .....	50
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Strategis/Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Direktorat Neraca Produksi 2025-2029	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025	23
Tabel 3.1	Perbandingan Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja per Sasaran	33
Tabel 3.2	Publikasi/Laporan dan Target Penyelesaiannya Tahun 2025	34
Tabel 3.3	Tingkat Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025 Terhadap Target Renstra	38
Tabel 3.4	Tingkat Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2023-2025 (persen)	31
Gambar 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi, 2025	32

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Direktorat Neraca Produksi	52
Lampiran 2.	Rencana Strategis Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025 - 2029	53
Lampiran 3.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025	57
Lampiran 4.	Perjanjian Kinerja dan Tingkat Pencapaian Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025	58
Lampiran 5.	Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Neraca Produksi Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan Januari 2025	59
Lampiran 6.	Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Neraca Produksi Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan Desember 2025	60
Lampiran 7.	Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Neraca Produksi Menurut Pangkat Golongan dan Jenjang Pendidikan Desember 2025	61
Lampiran 8.	Daftar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Target Pembinaan Tahun 2025	62
Lampiran 9.	Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025	63
Lampiran 10.	Daftar Inovasi Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025	65
Lampiran 11.	Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025	66
Lampiran 12.	Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun Anggaran 2025	67



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pusat Statistik. Direktorat Neraca Produksi, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan penyusunan neraca barang dan jasa, konsolidasi neraca produksi nasional dan konsolidasi neraca produksi regional.

Adapun tugas Direktorat Neraca Produksi adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Neraca Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Neraca Produksi.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2025 Direktorat Neraca Produksi melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan rata-rata capaian di atas 79 persen. Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN Pagu Program PPIS yang tersedia dengan nilai sebesar

Rp. 20.716.493.000,- (Pagu Awal sebesar Rp 3.285.220.000,- dan Pagu Tambahan untuk Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp. 17.431.273.000,-) dengan realisasi yang mencapai Rp 16.548.639.326,- atau terserap sebesar 79,88 persen.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Neraca Produksi menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat Neraca Produksi menunjukkan tingkat keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari realisasi belanja dengan tingkat penyerapan sebesar 79,88 persen selama tahun 2025.

Secara umum, semua target sasaran yang ditetapkan tercapai, pengukuran indikator kinerja utama Direktorat Neraca Produksi selama tahun 2025 menghasilkan capaian kinerja sebesar 110,78 persen. Rata-rata capaian kinerja yang dicapai tahun 2025, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 persen, capaian tahun 2025 mengalami peningkatan kinerja sebesar 10,78 persen. Peningkatan pencapaian tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik.

Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005;
- PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Guna menciptakan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Neraca Produksi (DNP) 2025-2029 telah disusun sebagai arah program dan kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun. Pada awal tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra, DNP telah melakukan penyusunan Renstra dan rencana kegiatan serta penetapan target berupa Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Realisasi dan target dilakukan monitoring setiap triwulanan dalam bentuk form rencana aksi dan dituangkan dalam Laporan Kinerja tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas DNP atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang ditetapkan selama tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja DNP di tahun yang akan datang.

## **1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

DNP merupakan salah satu unit eselon II di Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik pada Badan Pusat Statistik. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, DNP memiliki tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DNP menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tabel penyediaan dan penggunaan (*Supply and Use Tables*) serta tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha;
- c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha; dan
- d) pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Neraca Produksi.

Susunan organisasi dan tata kerja DNP terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana tersebut langsung berada di bawah Jabatan Tinggi Pratama atau Direktur Neraca Produksi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dibentuklah tim kerja. Adapun bagan organisasi Direktorat Neraca Produksi terdapat pada *Lampiran 1*.

### **1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran**

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai target dan sasarannya. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, organisasi perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten. Secara keseluruhan, total pegawai di DNP mengalami penurunan dari 64 orang pada Januari 2025 menjadi 63 orang pada Desember 2025, atau berkurang sebanyak 1 orang. Meskipun terjadi penurunan jumlah pegawai, struktur SDM tetap didominasi oleh jabatan

fungsional statistisi, sehingga pelaksanaan tugas teknis dan analitis tetap didukung oleh formasi yang memadai.

Potensi kualitas SDM salah satunya dapat diketahui dari tingkat pendidikan pegawai. Pada Januari 2025, tidak tercatat pegawai dengan jenjang pendidikan S3, sedangkan pada Desember 2025 tercatat 1 orang pegawai berpendidikan S3. Sementara itu, jumlah pegawai berpendidikan S2 tetap sebanyak 32 orang. Di sisi lain, jumlah pegawai berpendidikan S1/DIV mengalami penurunan dari 31 orang pada Januari 2025 menjadi 29 orang pada Desember 2025. Adapun pegawai dengan jenjang pendidikan DIII tetap 1 orang pada kedua periode. Berdasarkan komposisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM sangat baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DNP. Meskipun demikian, upaya pengembangan potensi SDM terus dilakukan melalui pemberian kesempatan untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut. Sepanjang tahun 2025, terdapat 2 orang pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar pada jenjang pendidikan S2. Sementara itu, terdapat 5 orang pegawai yang sedang melanjutkan tugas belajar di jenjang pendidikan S2 dan S3.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan. Jenis jabatan tersebut terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Administrasi (JA). Komposisi SDM DNP Desember 2025 terdiri dari 1 orang JPT atau Direktur, 11 orang Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Madya, 25 pegawai Fungsional Statistisi Ahli Muda, 18 pegawai Fungsional Statistisi Ahli Pertama, 1 pegawai Fungsional Arsiparis Terampil, dan 7 pegawai dengan jabatan Pelaksana. Jabatan Pelaksana terdiri dari 5 pegawai yang sedang melanjutkan tugas belajar dan 2 orang pegawai yang berstatus pelaksana. Rincian SDM secara lengkap dapat dilihat pada *Lampiran 5* dan *Lampiran 6*.

Dari sisi anggaran, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.285.220.000,-. Pada semester II tahun 2025, terjadi penambahan alokasi anggaran baru untuk Survei Monitoring dan Evaluasi

Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp. 17.431.273.000,-. Sehingga total anggaran menjadi Rp. 20.716.493.000,-. Penyerapan/realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 (31 Desember) sebesar Rp 16.548.639.326,- atau sebesar 79,88 persen. Anggaran tersebut dibagi ke dalam komponen kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897), Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (2897.BMA.004.055.D) sebesar Rp 17.431.273.000,-
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi (2899):
  - a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (2899.BDB) sebesar Rp 47.376.000,
  - b. Data dan Informasi Publik (2899.BMA) sebesar Rp 3.237.844.000,-

#### 1.4. Potensi dan Permasalahan

Data dan informasi statistik yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh berbagai pengguna data baik lingkup nasional seperti kementerian/lembaga/dunia usaha/peneliti maupun dari kalangan internasional. Pemerintah pusat maupun daerah menggunakan data tersebut untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan sedangkan sektor swasta memerlukan untuk perencanaan bisnis. Sementara itu, lembaga internasional menggunakan data tersebut untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia.

Secara berkala Direktorat Neraca Produksi melakukan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) maupun publikasi tahunan sesuai dengan *Advanced Release Calendar* (ARC) atau senarai rencana publikasi yang telah ditetapkan. Target jumlah *release* sebanyak 4 BRS dan 12 publikasi. Selain itu juga disusun 9 laporan. Pada tahun 2025, target itu berhasil diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2025 atau tingkat capaian sebesar 100 persen. Pada tahun 2025, terdapat permintaan kerjasama terkait penyusunan PDB Satelit Syariah, Ekonomi Kreatif, dan Industri Pos, Kurir, Logistik, dan Jasa Penyiaran. Besarnya antusias pengguna data menjadi tantangan sekaligus potensi untuk terus mengembangkan perstatistikan dalam lingkup DNP.

Terkait isu lingkungan, BPS memiliki peran dalam penyediaan data mengenai pembangunan berkelanjutan. Dengan disahkannya peraturan kepala BPS nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan maka peran K/L sebagai penyedia data dan BPS sebagai *compiler* neraca ekonomi lingkungan semakin kuat. DNP telah melakukan kajian terkait lingkungan dengan tema yang berbeda setiap tahun. Pada tahun 2025 dilakukan kajian SEEA Ekonomi Hijau 2025 memanfaatkan data Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP) Tahun 2025 dan berbagai sumber data sekunder lainnya. Kegiatan tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2025 dengan strategi utama kebijakan *net zero emissions* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Potensi lain yang dimiliki DNP selain tingginya permintaan data keneracaan adalah SDM yang didominasi pegawai dengan pendidikan S1 ke atas. Dukungan SDM yang kuat dimaksimalkan untuk terus berinovasi dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. DNP juga berperan aktif dalam kegiatan *training*, *workshop*, dan seminar tingkat nasional dan internasional. Kegiatan internasional antara lain menjadi narasumber dalam kegiatan *Study Visit of LSB to BPS-Statistics Indonesia on SEEA-AFF Implementation*, *SDG8 online training*, *Webinar series on the 2025 System of National Accounts (2025 SNA) Implementation: Islamic Finance*, *Regional Workshop on The Compilation on Tourism Satellite Account under ASEAN-Help ASEAN Framework (AHAF)*, dan *Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific*.

Potensi SDM tersebut juga didukung oleh beberapa sistem informasi yang menunjang kegiatan DNP baik bersifat teknis maupun non teknis. Aplikasi berbasis web yang dimaksud antara lain Verdana, Simavic, SUT, dan pemilihan *employee of the month*, *employee of the year*, *change champions* serta *change agents*.

Meskipun program kegiatan DNP sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tetapi masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Secara umum, untuk menghasilkan data keneracaan berkualitas, DNP

masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Kebutuhan data yang belum tersedia sepenuhnya baik dari internal maupun eksternal sehingga DNP harus melakukan survei khusus. Pelaksanaan Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP) dan Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) sudah menggunakan aplikasi FASIH. Dengan adanya FASIH, durasi pengumpulan data dapat dipangkas dan data dapat segera *clean/selesai* oleh para petugas lapangan. Selain itu, monitoring pemasukan dokumen serta pemantauan kualitas data melalui anomali dapat dilihat melalui FASIH *Dashboard*.

Pelaksanaan survei DNP berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan tetapi masih ada keengganan beberapa responden untuk menjawab pertanyaan terkait ekonomi. Kendala juga dialami pada proses diseminasi publikasi, terutama terkait penggunaan *software Adobe* yang harus digunakan secara bergantian. Meskipun demikian, publikasi tetap terbit sesuai dengan senarai rencana terbit yang telah ditetapkan.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan perencanaan dan anggaran. Munculnya kegiatan *ad hoc* seperti Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dan penyusunan neraca satelit berdampak pada penyesuaian jadwal beberapa kegiatan. Dibutuhkan koordinasi lebih awal terkait penyusunan neraca satelit untuk perencanaan kegiatan yang lebih baik. Koordinasi dengan K/L/D/I tidak hanya diperlukan dalam konteks penyusunan neraca satelit, tetapi juga terkait perstatistikan lainnya, khususnya dalam penyediaan data keneracaan yang dibutuhkan dengan payung hukum yang kuat. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan pemotongan/efisiensi anggaran atau *automatic adjustment* sehingga berdampak pada pengaturan ulang kegiatan.

## 1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan kinerja Direktorat Neraca Produksi disusun ke dalam 4 bab sebagai berikut:

**BAB I** **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan Latar Belakang; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Sumber

Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran; Potensi dan Permasalahan; dan Sistematika Penyajian Laporan.

**BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini disajikan Visi dan Misi; Target Kinerja 2025-2029; Perjanjian Kinerja Tahun 2025; Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

**BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisikan Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025; Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra; Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; Prestasi dan Inovasi; dan Realisasi dan Efisiensi Anggaran.

**BAB IV Penutup**, bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Visi dan Misi BPS

Visi dan Misi BPS 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Perumusan ini juga selaras dengan arah kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas. Visi BPS Tahun 2025-2029 adalah **“Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam visi yang baru tersebut BPS menetapkan visi yang berlandaskan prinsip independensi, kepercayaan publik, peran aktif, serta dukungan penuh terhadap kebijakan berbasis data. Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi objektivitas dan tidak memihak, BPS memastikan seluruh proses statistik berjalan netral dan bebas dari intervensi, sehingga mampu mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal.

Dalam menjaga kepercayaan publik, BPS berkomitmen menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas tinggi melalui metode yang terstandar serta proses yang transparan. BPS juga mengambil peran aktif dengan berkolaborasi dan berkontribusi bagi pembangunan nasional, baik melalui penyusunan statistik maupun pendampingan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menghasilkan data yang berkualitas.

Selain itu, BPS menjadi pilar penting dalam mendorong kebijakan berbasis data, memastikan setiap keputusan pemerintah memiliki landasan informasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh upaya ini sejalan dengan visi Presiden untuk menghadirkan pemerintahan

yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan data yang kredibel.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan beberapa misi yang telah dirumuskan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

#### 2.1.1. Visi Direktorat Neraca Produksi

Perumusan Visi dan Misi BPS dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 8 Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritasnya. Dengan adanya isu-isu strategis kelembagaan tersebut, maka BPS harus mampu menjadi lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mewujudkan perumusan kebijakan berbasis data. Hal tersebut dituangkan dalam Visi BPS 2025-2029 sebagai berikut:

**“Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**

Dari Visi BPS tersebut diturunkan Visi Deputy Bidang Neraca Analisis Statistik yaitu:

**“Menjadi Penyedia Insight dan Data Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas untuk Mewujudkan BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data”**

Bertolak dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat Neraca Produksi dalam rangka mendukung Visi dan Misi BPS dan Deputi Bidang Neraca Analisis Statistik maka ditetapkan Visi Direktorat Neraca Produksi sebagai berikut:

**“Menjadi Penyedia *Insight* dan Data Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas untuk Mewujudkan BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data”**

#### 2.1.2. Misi Direktorat Neraca Produksi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Direktorat Neraca Produksi merumuskan dua misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

**Misi 1: Menyediakan *Insight* dan Statistik Lintas Sektor yang berkualitas untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan**

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mendukung visi BPS dan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Data statistik yang berkualitas dan *insight* yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, Direktorat Neraca Produksi memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan visi Direktorat Neraca Produksi untuk menjadi penyedia *insight* dan data statistik lintas sektor yang berkualitas. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS, karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Direktorat Neraca Produksi menyediakan data statistik yang berpedoman kepada

konsep, standar, dan metodologi yang berlaku secara universal dan berstandar internasional serta mengikuti kaidah yang digariskan SNA 2008.

**Misi 2: Menguatkan Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran Direktorat Neraca Produksi dalam mendukung BPS sebagai lembaga statistik utama yang mengkoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan menguatkan kepemimpinan dalam SSN, BPS melalui Direktorat Neraca Produksi mengkoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Direktorat Neraca Produksi melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan K/L/D/I terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran yang perlu dipahami untuk menjalin kerjasama antara penyedia dan pengguna data.

Melalui keterpaduan dua misi tersebut, Direktorat Neraca Produksi menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, visi Direktorat Neraca Produksi sebagai penyedia *insight* dan data statistik lintas sektor yang berkualitas dapat terwujud.

**2.1.3. Tujuan Direktorat Neraca Produksi**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi penyelenggaraan pembangunan nasional. Data yang berkualitas dibutuhkan untuk menunjang kebijakan tersebut. Kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran bersumber dari data dan informasi berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Neraca Produksi berupaya untuk menyajikan *Insight* dan Statistik Lintas Sektor yang berkualitas.

Beberapa indikator strategis nasional yang digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional bersumber dari Direktorat Neraca Produksi. Hal ini menunjukkan bahwa peran Direktorat Neraca Produksi semakin penting dalam perencanaan pembangunan. Adapun beberapa indikator statistik dan kegiatan Direktorat Neraca Produksi yang dijadikan dasar perencanaan antara lain:

- i. Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha  
PDB/PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan ekonomi yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, alat ukur kinerja pemerintah (K/L/D/I), dan alat pembanding kemajuan ekonomi antar wilayah/negara.
- ii. PDRB Per Kapita yang dihasilkan setiap tahun digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Perimbangan Daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan lain-lain.
- iii. Tabel Input Output yang dihasilkan dalam lima tahunan untuk memberikan gambaran keterkaitan aktivitas ekonomi antar industri dan mengidentifikasi kekuatan produk yang dapat mendukung aliran produksi serta penggunaan barang dan jasa.
- iv. Sistem Neraca Ekonomi Lingkungan (Sisnerling)  
Penyusunan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dampak pembangunan terhadap ketersediaan dan peranan sumber daya alam dalam aktivitas kegiatan ekonomi. Sebagai bagian dari komitmen global terhadap pembangunan

berkelanjutan, BPS melalui Direktorat Neraca Produksi telah mengadopsi dan mengimplementasikan *System of Environmental Economic Accounting* (SEEA) untuk menjawab kebutuhan akan data yang terintegrasi

- v. Neraca Satelit Pariwisata (*Tourism Satellite Account*)  
Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA) bertujuan untuk mendapatkan indikator terkait Kontribusi Pariwisata. Indikator tersebut menjadi salah satu ukuran kinerja kementerian.

Untuk mewujudkan visi dan dan melaksanakan misi, Direktorat Neraca Produksi menetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang saling mendukung untuk memastikan keberhasilan setiap aspek penting operasionalnya. Rumusan tujuan Direktorat Neraca tahun 2025 - 2029 adalah:

**Tujuan 1: Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik neraca produksi yang berkualitas dan *insight* yang relevan**

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai visi Direktorat Neraca Produksi. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan *insight* yang relevan, Direktorat Neraca Produksi turut mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, sekaligus memperkuat peran aktif BPS dalam proses pengambilan keputusan strategis.

**Tujuan 2: Mewujudkan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi**

Keberhasilan dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional (SSN). SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan.

Direktorat Neraca Produksi melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L/D/I yang menjadi mitra terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran yang perlu dipahami. Tujuannya untuk menjalin kerjasama antara penyedia dan pengguna data.

#### 2.1.4. Sasaran Strategis Direktorat Neraca Produksi

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, Direktorat Neraca Produksi menetapkan 3 sasaran strategis beserta indikator kinerjanya. Sasaran strategis mengikuti sasaran kegiatan sebagai berikut:

##### **Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas**

Sasaran ini mencerminkan peran Direktorat Neraca Produksi dalam mendukung penyusunan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis berbasis data yang relevan dan terpercaya.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Direktorat menggunakan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS): Persentase Publikasi/Laporan Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas.**

Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang berkualitas adalah Perbandingan Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas dengan Seluruh Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang dihasilkan. Publikasi/Laporan yang berkualitas adalah publikasi/laporan yang bersumber dari kegiatan statistik yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek Pemanfaatan Data berkategori minimal Baik (Nilai:  $\geq 2,6$ ).

Data statistik berkualitas merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis bukti. Dengan

memberikan *insight* yang relevan, BPS melalui Direktorat Neraca Produksi berkontribusi terhadap:

- Peningkatan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.
- Optimalisasi alokasi sumber daya dalam pembangunan.
- Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang transparan.

Dalam proses pencapaian sasaran strategis ini, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan data statistik. Oleh karena itu, Direktorat mengimplementasikan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur, sebagai berikut:

1. Risiko Keterbatasan Data Dasar untuk Mendukung Estimasi Statistik Neraca Produksi

- Dampak: Data yang kurang lengkap akan mempengaruhi nilai estimasi yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data BPS
- Mitigasi:
  - ✓ Memperkuat kolaborasi internal maupun eksternal terkait kebutuhan dan ketersediaan data yang lebih detail.
  - ✓ Menyelenggarakan Survei Khusus untuk kegiatan yang belum ada datanya.

2. Risiko Kualitas dan Relevansi Data untuk Publikasi/Laporan Statistik Neraca Produksi

- Dampak: Data yang kurang akurat dan tidak relevan mempengaruhi nilai estimasi yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data BPS
- Mitigasi:
  - ✓ Memperkuat pemahaman terkait konsep dan metodologi berdasarkan SNA 2008 melalui kegiatan internalisasi, FGD maupun *Technical Assistance* dengan penyedia data internal maupun eksternal.

- ✓ Melakukan evaluasi kesesuaian angka dan fenomena.
  - ✓ Melakukan pengembangan metodologi.
3. Risiko Ketergantungan pada Teknologi Informasi
    - Dampak: Gangguan pada sistem informasi menghambat proses kompilasi dan rekonsiliasi data neraca produksi.
    - Mitigasi:
      - ✓ Menyediakan lembar kerja manual.
      - ✓ Melakukan kompilasi dan rekonsiliasi secara offline.
  4. Risiko Infrastruktur Statistik yang Belum Terintegrasi
    - Dampak: Data yang disajikan memiliki peluang kesalahan dan tidak *realtime*.
    - Mitigasi:
      - ✓ Menyediakan lembar kerja yang terintegrasi.

**Sasaran Strategis 2: Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi**

Untuk mengukur pencapaian penyediaan indikator sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan, Direktorat Neraca Produksi menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS): **Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi yang Menjadi Statistik Resmi.**

Dalam proses pencapaian sasaran strategis ini, terdapat sejumlah potensi risiko yang mempengaruhi kualitas dan pencapaian target. Untuk itu, BPS mengimplementasikan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur:

1. Risiko Keterbatasan Data yang Detail untuk Menghasilkan Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang diampu Neraca Produksi
  - Dampak: Data yang kurang lengkap akan mempengaruhi nilai estimasi yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data BPS.

- Mitigasi:
  - ✓ Membentuk forum koordinasi reguler antar-instansi statistik.
  - ✓ Mengembangkan pedoman standar statistik nasional yang diterapkan secara seragam.
  - ✓ Menguatkan peran BPS sebagai koordinator utama dalam SSN.
- 2. Risiko Keterbatasan Pemahaman Penyedia dan Pengguna Data
  - Dampak: Penyedia data mungkin tidak bisa menyediakan data yang relevan dan representatif. Dan bagi pemangku kepentingan mungkin tidak memanfaatkan data secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan indikator dan *insight*nya.
  - Mitigasi:
    - ✓ Memperkuat pemahaman terkait konsep, metodologi penghitungan, dan analisisnya berdasarkan standar nasional maupun internasional melalui kegiatan internalisasi, FGD maupun *Technical Assistance* dengan penyedia data maupun pengguna data
- 3. Risiko Kualitas dan Relevansi Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang diampu Neraca Produksi
  - Dampak: Data yang tersedia kurang akurat dan tidak relevan mempengaruhi nilai estimasi yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data BPS.
  - Mitigasi:
    - ✓ Memperkuat pemahaman terkait konsep dan metodologi berdasarkan SNA 2008 melalui kegiatan internalisasi, FGD maupun *Technical Assistance* dengan penyedia data internal maupun eksternal.
    - ✓ Melakukan evaluasi kesesuaian angka dan fenomena.

Dengan mengelola risiko secara terencana, Direktorat Neraca Produksi memastikan Indikator Utama Pembangunan dapat disajikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, Direktorat Neraca Produksi dapat mewujudkan sasaran strategis ini.

**Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi**

Sasaran Strategis ini mencerminkan komitmen Direktorat Neraca dalam memastikan integrasi, konsistensi, dan efektivitas penyelenggaraan statistik nasional, yang menjadi landasan penting dalam mendukung kebijakan berbasis data di seluruh tingkatan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Direktorat Neraca Produksi menggunakan Indikator **Kinerja Sasaran Strategis (IKSS): Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi**.

Indeks Pembangunan Statistik mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indikator tersebut mengukur keberhasilan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Direktorat, dan merupakan komposit dari 2 variabel pembentuk yaitu Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Standar dan Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat dalam penyelenggaraan statistik Sektoral.

Dalam proses pencapaian sasaran strategis ini, terdapat sejumlah potensi risiko yang mempengaruhi kualitas dan integrasi SSN. Untuk itu, Direktorat Neraca Produksi mengimplementasikan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur:

1. Risiko Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral ke Kementerian/Lembaga Mitra kurang optimal

- Dampak: Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektor ke Kementerian/Lembaga Mitra menjadi terhambat dan target IPS tidak tercapai.
- Mitigasi:
  - ✓ Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dan pendekatan persuasif ke Kementerian/Lembaga Mitra agar bersedia untuk melaksanakan PSS sesuai target yang telah disepakati.

Dengan mengelola risiko secara terencana, Direktorat Neraca Produksi memastikan Indeks Pembangunan Statistik meningkat secara konsisten, mendukung penyelenggaraan SSN yang berkualitas dan terpadu. SSN yang baik dan terpadu tidak hanya mendukung tercapainya visi BPS, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan berbasis data dapat diimplementasikan secara efektif untuk kemajuan bangsa.

## 2.2. Target Kinerja Direktorat Neraca Produksi 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga 2025-2029 bahwa target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra DNP 2025-2029 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DNP untuk tahun 2025 - 2029, serta mendukung pencapaian visi misi BPS, ditetapkan dua tujuan dan dua sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*outcome*) dari program DNP. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap

sasaran program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis DNP 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Sasaran Strategis/Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Direktorat Neraca Produksi 2025-2029**

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan berbasis data statistik neraca produksi yang berkualitas dan insight yang relevan								
1	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persentase Publikasi/ Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	100	100	100	100	100	persen
2	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi yang Menjadi Statistik Resmi	0	40	50	90	100	persen
Mewujudkan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi								
1	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi	70,51	78,11	82,11	91,55	95,55	poin

### Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2025 - 2029, DNP akan menjalankan satu program pokok dan satu kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang

akan dijalankan oleh DNP dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- Program: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)
- Kegiatan: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi
- Kegiatan (Tambahan): Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik
- Sasaran kegiatan:
  - a. Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas, dengan indikator sasaran kinerja Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas.
  - b. Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi, dengan indikator sasaran kinerja Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi yang Menjadi Statistik Resmi.
  - c. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi, dengan indikator sasaran kinerja Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi.

### **2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025**

Selama tahun 2025 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh DNP sebagai ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas lembaga pemerintahan. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target yang telah ditetapkan. Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab DNP:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	100,00 Persen
2	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi	70,51 Poin

## 2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

### 2.4.1. Prioritas Nasional: Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025-2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas

melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

**Direktorat Neraca Produksi memiliki peran kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai pembina kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) untuk beberapa Kementerian/Lembaga, yaitu di antaranya:**

- 1) Mahkamah Agung RI
- 2) Komisi Pemilihan Umum RI
- 3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI
- 4) Lembaga Ketahanan Nasional RI
- 5) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI

#### **2.4.2. Prioritas Presiden: Makan Bergizi Gratis**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

**Direktorat Neraca Produksi** berperan strategis dalam pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dengan menempatkan Direktur Neraca Produksi sebagai Ketua Pelaksana kegiatan. Dalam peran ini, Direktorat Neraca Produksi juga bertanggung jawab atas pengendalian

umum, koordinasi lintas unit, serta memastikan pelaksanaan survei berjalan selaras dengan tujuan dan kebutuhan kebijakan. Kemudian, Direktorat Neraca Produksi bersama dengan tim dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial menjadi penanggung jawab teknis survei, mulai dari perencanaan, perumusan metodologi, desain instrumen, hingga pengendalian kualitas data, sehingga survei monitoring MBG dapat menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), *Supplier* (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei *Baseline* dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei *Baseline* adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan

koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

Output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan tersebut diantaranya adalah instrumen survei berupa kuesioner dan buku pedoman, moda pencacahan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) dan *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI) melalui aplikasi FASIH, web monitoring, raw data hasil pendataan, serta tabulasi dan analisis hasil pendataan yang dituangkan dalam bentuk *booklet* dan laporan. Output utama dari pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG adalah untuk mengukur dampak Program MBG terhadap gizi dan kesehatan masyarakat, perekonomian, dan ketenagakerjaan. Output kegiatan ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan, memastikan ketepatan sasaran dan kualitas layanan, serta mengidentifikasi kendala dan praktik di lapangan. Hasil survei ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan program, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas keberlanjutan pelaksanaan Program MBG.

#### **2.4.3. Isu Strategis Nasional: Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK**

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis *System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework*. Selain itu, koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM),

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif.

Pada tahap pengukuran, dilakukan perhitungan neraca arus energi dan emisi GRK menurut lapangan usaha dan komponen konsumsi akhir. Penyusunan indikator turunan dari neraca terkait seperti bauran energi terbarukan dalam konsumsi akhir, intensitas energi, serta emisi dan intensitas emisi GRK. Pada tahap diseminasi hasil dilakukan baik kepada pemangku kepentingan nasional maupun internasional. Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi kinerja berupa penyusunan publikasi resmi Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia.

Output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan tersebut meliputi rapat atau diskusi, dataset neraca arus dan neraca emisi GRK Indonesia tahun 2019-2023, indikator inti berupa intensitas energi dan intensitas emisi GRK, serta publikasi resmi BPS berjudul Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia 2019-2023 yang dirilis pada Juni 2025. Selain itu kita juga mendukung *Global Data Collection* terkait Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia yang dinaungi oleh *United Nation Statistics Division (UNSD)*. Data emisi GRK perkapita juga berkontribusi dalam pengisian kuesioner BRICS. Output ini menjadi dasar penting dalam penyediaan data lingkungan strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Output Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi juga berkontribusi dalam pemenuhan rekomendasi DGI fase 3 untuk rekomendasi 1 dan 2. BPS diundang dalam beberapa pertemuan DGI sebagai pembicara seperti G20 DGI-3

*Webinar: Closing Data Gaps to Better Understand Energy Supply and Use* pada 2 Juni 2025 dan *G20 DGI-3 Global Conference* pada tanggal 17 Juni 2025 untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi di Indonesia.

## 2.5. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sesuai dengan Renstra BPS tahun 2025-2029, DNP mendukung salah satu dari program pokok BPS yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari program tersebut diturunkan menjadi satu kegiatan pokok DNP yaitu “Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi”. Kegiatan pokok tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh DNP, yaitu:

- 1 Penyediaan Data NTB Lapangan Usaha Barang Triwulanan dan Tahunan
- 2 Penyediaan Data NTB Lapangan Usaha Jasa Triwulanan dan Tahunan
- 3 Penyediaan Data PDRB Triwulanan dan Tahunan
- 4 Penyediaan SUT Regional yang terkonsolidasi dengan SUT Nasional
- 5 Penyediaan Data PDB-CVM Lapangan Usaha
- 6 Penyediaan Data CVM Lapangan Usaha Barang
- 7 Penyediaan Data CVM Lapangan Usaha Jasa
- 8 Pelaksanaan Survei Neraca Produksi
- 9 Penyusunan PDB Satelit
- 10 Penyediaan Publikasi dan Laporan PDB Triwulanan
- 11 Penyediaan Publikasi Pendapatan Nasional Indonesia
- 12 Penyediaan Publikasi/Laporan *Supply and Use Table* (SUT) Nasional
- 13 Penyediaan Publikasi/Laporan *Tourism Satellite Account* (TSA) Indonesia

- 14 Penyediaan Publikasi/Laporan Neraca Ekonomi-Lingkungan (SEEA)
- 15 Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial untuk K/L/D/I
- 16 Penghitungan Pajak
- 17 Penyusunan Deflator Nasional dan Deflator Regional
- 18 Inventarisasi dan Kajian Pengembangan SNA 2025
- 19 Perancangan Implementasi SNA 2025
- 20 Penyelenggaraan Hubungan dan Keterlibatan DNP di Forum Internasional dalam bentuk *Insight Statistik (concept note, comments, dan lain-lain), consultation, sharing knowledge, capacity building, technical assistance, dan lain-lain*
- 21 Pelaksanaan Program Kerja Reformasi Birokrasi
- 22 Pemenuhan kelengkapan SAKIP Direktorat Neraca Produksi

Dalam perjalanannya, Direktorat Neraca Produksi diamanahkan peran strategis dalam pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dengan penempatan Direktur Neraca Produksi sebagai Ketua Pelaksana kegiatan. Dalam peran ini, Direktorat Neraca Produksi juga bertanggung jawab atas pengendalian umum, koordinasi lintas unit, serta memastikan pelaksanaan survei berjalan selaras dengan tujuan dan kebutuhan kebijakan. Kemudian, Direktorat Neraca Produksi bersama dengan tim dari Kedeputan Bidang Statistik Sosial menjadi penanggung jawab teknis survei, mulai dari perencanaan, perumusan metodologi, desain instrumen, hingga pengendalian kualitas data, sehingga survei monitoring MBG dapat menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, rencana kinerja DNP menjadi bertambah dengan adanya Kegiatan *ad hoc* Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG sejalan dengan penambahan anggaran kegiatan 'Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik' untuk Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan (PNBP) Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. Alokasi Anggaran Direktorat Neraca Produksi Tahun Anggaran 2025 selengkapnya dapat dilihat pada *lampiran 12* dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada *lampiran 3*.

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud kewajiban Direktorat Neraca Produksi dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan selama satu periode pelaporan, yang disampaikan melalui laporan kinerja secara periodik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Neraca Produksi dilaksanakan selaras dengan rencana strategis sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Laporan kinerja ini menyajikan analisis atas capaian kinerja, pencapaian prestasi dan inovasi, serta realisasi dan efisiensi pemanfaatan anggaran.

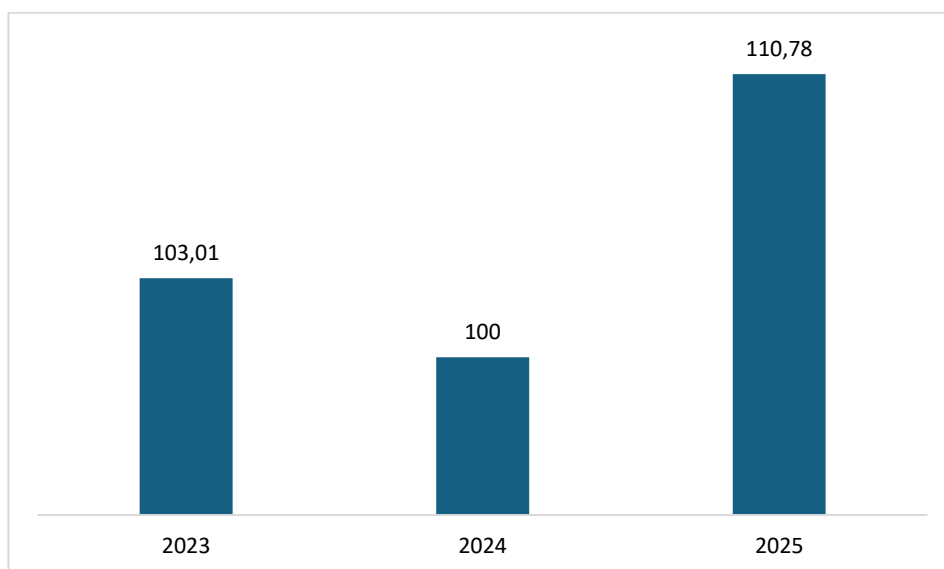
### 3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025

Tujuan yang ingin dicapai Direktorat Neraca Produksi adalah mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik neraca produksi yang berkualitas dan *insight* yang relevan, serta mewujudkan pembinaan statistik sektoral K/L mitra DNP. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka Direktorat Neraca Produksi mempunyai 3 sasaran strategis yaitu Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas (Sasaran 1), Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi (Sasaran 2), dan Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi (Sasaran 3). Pencapaian ketiga sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjabaran IKSS untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran 1 diukur dengan indikator persentase publikasi/laporan statistik neraca produksi yang berkualitas

2. Sasaran 2 diukur dengan indikator persentase indikator sasaran visi indonesia emas dan 45 indikator utama pembangunan neraca produksi yang menjadi statistik resmi
3. Sasaran 3 mendukung indikator tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Neraca Produksi

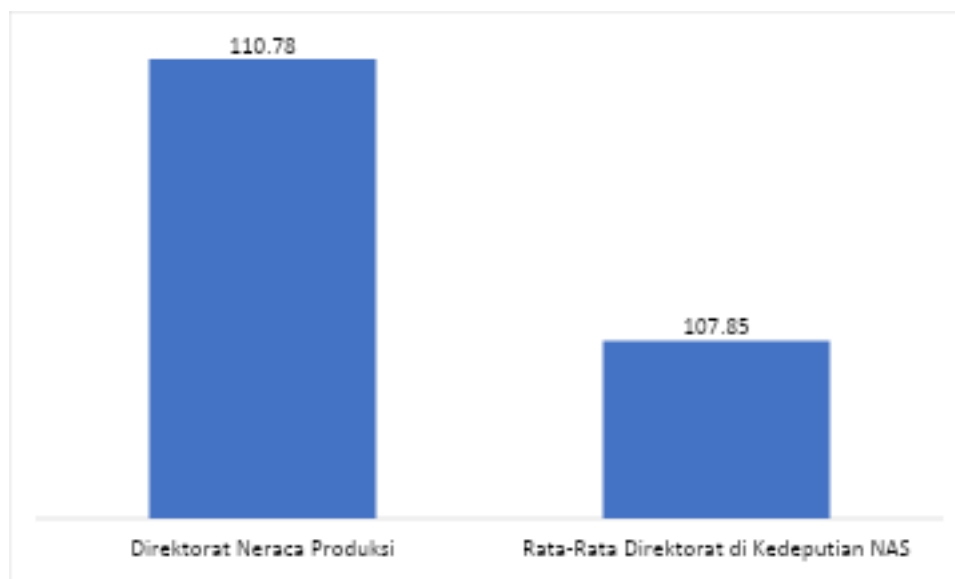
Kemajuan capaian kinerja Direktorat Neraca Produksi dapat diukur dengan membandingkan capaian antar tahun berdasarkan selisih realisasi antar tahun. Secara umum, tingkat capaian kinerja Direktorat Neraca Produksi pada tahun 2023-2025 telah memenuhi target, bahkan ada capaian kinerja yang melampaui target yaitu rata-rata capaian pada tahun 2023 dan 2025. Capaian kinerja paling besar terjadi pada tahun 2025, yaitu sebesar 110,78 persen. Hal itu disebabkan oleh realisasi aktivitas pembinaan statistik sektoral yang dilakukan untuk K/L mitra DNP melebihi target yang telah ditetapkan. BPS melakukan pembinaan statistik sektoral sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.



**Gambar 3.1 Tingkat Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2023-2025 (persen)**

Sementara itu, capaian kinerja tahun 2024 menurun 3,01 persen dibandingkan dengan tahun 2023, meskipun rata-rata capaian tahun 2024 mencapai 100 persen. Penurunan pencapaian tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi banyaknya K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik. Pada tahun 2024, Direktorat Neraca Produksi membina 6 K/L/D/I sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Predikat Kinerja Organisasi (PKO) didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian program atau kegiatan organisasi yang diklasifikasikan ke dalam lima predikat yaitu Istimewa, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang. Komponen utama PKO terdiri dari capaian perjanjian kinerja dan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai PKO DNP tahun 2025 adalah sebesar 94,5. Berdasarkan Permenpan RB No. 22 Tahun 2024, PKO DNP mendapatkan predikat Baik. Hal ini berarti tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.



**Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi, 2025**

Total tingkat pencapaian kinerja Direktorat Neraca Produksi tahun 2025 sebesar 110,78 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja eselon II di Kedeputian Neraca dan Analisis Statistik, kinerja Direktorat Neraca Produksi tahun 2025 memiliki kinerja yang lebih tinggi (lihat Gambar 3.2). Adapun upaya yang telah dilakukan Direktorat Neraca Produksi selama tahun 2025 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pembinaan statistik sektoral

secara berkala sehingga dapat memantau tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral yang telah dilakukan. Selain itu, dalam kaitannya dengan perhitungan PDB/PDRB, upaya yang telah diterapkan adalah meningkatkan koordinasi dengan para penyedia data (*subject matter* dan K/L/D/I) sehingga data dapat diperoleh tepat waktu dan data PDB/PDRB yang dihasilkan semakin berkualitas.

Jika ditinjau menurut sasaran strategis, capaian kinerja dari kedua sasaran strategis (Sasaran 1 dan Sasaran 3) Direktorat Neraca Produksi mencapai 100 persen. Sementara itu, Sasaran 2 belum dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi pada tahun 2025. Jika dilihat lebih dalam, nilai capaian Sasaran 3 jauh melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun. Ukuran keberhasilan dari tujuan dan rencana strategis tersebut berasal dari indikator kerja utama (IKU). Target, realisasi dan capaian kinerja dari sasaran strategis dan IKU dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Perbandingan Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas										
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)		100
Sasaran 2. Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi										
Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi yang Menjadi Statistik Resmi	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	0	N/A (Belum dijadikan indikator)	0	N/A (Belum dijadikan indikator)	0	N/A (Belum dijadikan indikator)		0
Sasaran 3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi										
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi.	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	70,51	N/A (Belum dijadikan indikator)	85,71	N/A (Belum dijadikan indikator)	121,55	N/A (Belum dijadikan indikator)		121,55

\*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir

Berdasarkan Tabel 3.1, terlihat bahwa untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran strategis Direktorat Neraca Produksi ditunjang dari tercapainya tiga IKU. Adapun penjelasan dari capaian setiap IKU Direktorat Neraca Produksi pada tahun 2025 sebagai berikut:

**a. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas**

Pencapaian untuk indikator ini adalah 100 persen yaitu dihitung dari realisasi publikasi/laporan yang diselesaikan tepat waktu dengan target total publikasi/laporan yang diterbitkan di DNP. Pada tahun 2025, banyaknya publikasi/laporan yang disusun oleh DNP sebanyak 25 publikasi/laporan yang terdiri dari 4 BRS, 12 publikasi, serta 9 laporan. Seluruh publikasi/laporan ditargetkan tersebut dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun publikasi/laporan dan target jadwal penyelesaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Publikasi/Laporan dan Target Penyelesaiannya Tahun 2025**

No (1)	Judul (2)	Jadwal Terbit (3)
1	BRS Produk Domestik Bruto Triwulan IV Tahun 2024	5 Februari 2025
2	BRS Produk Domestik Bruto Triwulan I Tahun 2025	5 Mei 2025
3	BRS Produk Domestik Bruto Triwulan II Tahun 2025	5 Agustus 2025
4	BRS Produk Domestik Bruto Triwulan III Tahun 2025	5 November 2025
5	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2020-2024	11 April 2025
6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024	10 Juni 2025
7	Pendapatan Nasional Indonesia 2020-2024	20 Juni 2025
8	<i>Tourism Satellite Account</i> Indonesia 2018-2023	30 Juni 2025
9	Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2019-2023	30 Juni 2025
10	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2020-2024, Buku 1 Pulau Sumatera	15 September 2025
11	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2020-2024, Buku 2 Pulau Jawa-Bali	15 September 2025

No	Judul	Jadwal Terbit
(1)	(2)	(3)
12	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2020-2024, Buku 3 Pulau Kalimantan	15 September 2025
13	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2020-2024, Buku 4 Pulau Sulawesi	15 September 2025
14	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2020-2024, Buku 5 Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	15 September 2025
15	Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2021-2025	16 Oktober 2025
16	Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi 2020-2024	30 Desember 2025
17	Laporan <i>Supply and Use Table</i> Indonesia	31 Desember 2025
18	Laporan Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP)	31 Desember 2025
19	Laporan <i>Indepth Study</i> SEEA-Tahun 2025	31 Desember 2025
20	Laporan Matriks Supply dan SUT Regional	31 Desember 2025
21	Laporan Hasil Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) Barang	31 Desember 2025
22	Laporan Penyusunan dan Pengembangan Neraca Produksi Lapangan Usaha Barang	31 Desember 2025
23	Laporan Hasil Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) Jasa	31 Desember 2025
24	Laporan Penyusunan dan Pengembangan Neraca Produksi Lapangan Usaha Jasa	31 Desember 2025
25	Laporan Kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG	31 Desember 2025

Dalam menyusun publikasi/laporan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Adanya ketidakpastian anggaran di awal tahun karena himbauan efisiensi;
- Data yang masuk belum sesuai *timeline* dan belum sesuai dengan format yang diminta;
- Konsistensi data perlu verifikasi lanjutan;
- Koordinasi ke daerah belum optimal;
- Penyusunan publikasi bilingual memerlukan akurasi terjemahan dan editing yang sesuai dengan standar publikasi resmi;

- Penyerapan anggaran mundur akibat pergeseran rencana kegiatan besar dari September ke Oktober.

Untuk menyelesaikan kendala tersebut, beberapa langkah-langkah solusi yang dilakukan antara lain:

- Diskusi dan koordinasi terkait kepastian anggaran;
- Pemeriksaan dan evaluasi data-data dari daerah serta komunikasi dengan PIC agar sesuai dengan *template*;
- Optimalkan koordinasi melalui sosial media grup daerah;
- Melakukan pencarian aplikasi untuk membantu akurasi terjemahan dan editing struktur kalimat sesuai standar;
- Penyerapan anggaran dimaksimalkan di bulan Oktober.

Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi di periode mendatang yaitu:

- Membuat list kondisi perangkat IT yang dikuasai oleh pegawai Direktorat Neraca Produksi baik yang dimiliki sendiri maupun BMN;
- Meningkatkan koordinasi dengan Kemenhut melalui rapat;
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi.

#### **b. Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi yang Menjadi Statistik Resmi**

Pencapaian untuk indikator ini adalah 0 persen karena belum ada realisasi maupun target pada tahun 2025. Kendala untuk kegiatan ini juga tidak ada karena belum ada target di tahun yang sama, sehingga tidak ada solusi dan tindak lanjut yang bisa dirumuskan dari evaluasi tahun 2025.

#### **c. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor (PSS) Direktorat Neraca Produksi**

Pembinaan statistik sektoral untuk K/L/D/I merupakan amanat Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana BPS memiliki peran sebagai Pembina Data Statistik Sektoral. Tugas yang dilakukan sebagai pembina data

adalah menetapkan standar data, menetapkan struktur dan format baku metadata, memberikan rekomendasi, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Statistik sektoral yang berkualitas menjadi tujuan dari pembinaan. Data yang berkualitas diperlukan untuk perencanaan pembangunan. Selama tahun 2025, Tim Pembina Direktorat Neraca Produksi telah melaksanakan berbagai pembinaan statistik sektoral baik yang berdasarkan rencana kerja maupun yang diluar rencana kerja. Adapun tingkat capaian dari tingkat keberhasilan pembinaan statistik sebesar 121,55 persen.

Dalam pelaksanaannya, aktivitas pembinaan statistik sektoral untuk K/L mitra DNP menghadapi beberapa kendala, yaitu anggota tim PSS 2025 yang baru memerlukan internalisasi materi PSS; K/L mitra PSS sebagian merupakan K/L mitra yang baru; perbedaan respon tiap K/L mitra PSS terkait pelaksanaan PSS; dan terkendala kegiatan prioritas bagi tim PSS maupun K/L mitra untuk penyesuaian waktu pelaksanaan. Solusi yang dilakukan adalah internalisasi PSS untuk tim baru; pendekatan persuasif ke K/L mitra agar berperan aktif di PSS; dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan K/L mitra. Tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan mendatang adalah melakukan koordinasi dan pendekatan persuasif ke K/L mitra agar bersedia berperan aktif dalam kegiatan PSS dan melakukan rapat monitoring dan evaluasi PSS 2026.

### **3.2. Capaian Kinerja Direktorat Neraca Terhadap Target Renstra**

Secara umum target perjanjian kinerja tahun 2025 sejalan dengan target Renstra DNP Tahun 2025-2029. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan pada Renstra dan PK, terdapat 1 (satu) indikator yang ditargetkan tercapai 100 persen. Sementara 1 (satu) indikator yaitu tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral DNP ditargetkan tercapai 70,51 poin. Pada realisasinya, semua indikator bisa mencapai bahkan ada yang melampaui target Renstra dengan capaian pada tahun 2025 melebihi 100 persen. Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan capaian terhadap target 2029,

indikator tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral DNP masih di bawah 100 persen.

Adapun faktor-faktor yang mendorong ketercapaian target diantaranya: perencanaan yang jelas dan realistis karena target harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART); pimpinan mampu memberi arahan, serta mengambil keputusan secara tepat; sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dimana pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tugasnya; koordinasi dan kerja sama yang baik; melakukan monitoring secara berkala guna membantu mendeteksi hambatan sejak dini dan melakukan perbaikan; dan komunikasi yang efektif sehingga informasi terkait tujuan, tugas, dan capaian tersampaikan dengan jelas ke seluruh pihak.

**Tabel 3.3 Tingkat Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025 Terhadap Target Renstra**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 2. Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi						
Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi yang Menjadi Statistik Resmi	Persen	0	100	0	0	0
Sasaran 3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi						
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi.	Poin	70,51	95,55	85,71	121,55	89,70

\*) Diambil dari :

*Target Renstra sesuai surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025, hal : Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-2029, dan Indikator Proksi IKU*

Adapun faktor-faktor yang menghambat ketercapaian target diantaranya: adanya ketidakpastian anggaran di awal tahun karena himbuan efisiensi; data yang masuk belum sesuai *timeline* dan belum sesuai dengan format yang diminta; konsistensi data perlu verifikasi lanjutan; koordinasi ke daerah belum optimal; penyusunan publikasi bilingual memerlukan akurasi terjemahan dan editing yang sesuai dengan standar publikasi resmi; penyerapan anggaran mundur akibat pergeseran rencana kegiatan besar dari September ke Oktober; Tim PSS 2025 yang baru memerlukan internalisasi materi PSS; K/L mitra PSS sebagian merupakan K/L mitra yang baru; perbedaan respon tiap K/L mitra PSS terkait pelaksanaan PSS; dan terkendala kegiatan prioritas bagi tim PSS maupun K/L mitra untuk penyesuaian waktu pelaksanaan.

### **3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025**

#### **3.3.1 Capaian Prioritas Nasional**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamankan BPS, sebagai lembaga negara yang bertugas dalam bidang perstatistikan, untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik. Secara khusus, pembinaan statistik dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Salah satu lokus pembinaan statistik yang dilakukan BPS adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) melalui program “Pembinaan Statistik Sektoral”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, arah pembangunan Indonesia Emas 2045 adalah untuk mewujudkan Visi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Sebagai turunan UU tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Melalui peraturan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peranan mendukung Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Salah satu Prioritas Nasional yang didukung

BPS adalah Agenda Transformasi Tata Kelola khususnya pada Proyek Prioritas “Penyediaan Data Pembangunan”. Adapun untuk Rincian Output Prioritas BPS, salah satunya adalah Pembinaan Statistik Sektoral.

Pembinaan statistik sektoral merupakan wujud koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan statistik sektoral antara BPS dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah guna mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Secara detail, pembinaan statistik sektoral bertujuan untuk:

- meningkatkan kompetensi penyelenggara statistik sektoral;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral; dan
- menyediakan statistik sektoral yang berkualitas.

Pembinaan statistik sektoral tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral BPS, yang selanjutnya disebut dengan Tim Pembina, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan alokasi lokus binaan sesuai yang diatur dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 200 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Pembinaan Statistik Sektoral pada Badan Pusat Statistik. Direktorat Neraca Produksi (DNP) merupakan salah satu unit kerja BPS di tingkat pusat ditugaskan untuk melakukan pembinaan statistik sektoral kepada 5 (lima) Kementerian/Lembaga yaitu: (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), (2) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU), (3) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), (4) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas), dan (5) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan tersebut meliputi rapat atau diskusi, pembinaan statistik berdasarkan rencana kerja di lima Kementerian/Lembaga, pembinaan statistik di luar rencana kerja berupa kegiatan bimbingan teknis panduan statistik sektoral di KPU dan kegiatan verifikasi data perkara peradilan MA, serta laporan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2025.

Kendala pada penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral tahun 2025 antara lain (1) kendala penjadwalan kegiatan pembinaan yang disebabkan oleh tingginya tingkat kesibukan masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) serta tim PSS DNP, sehingga sulit untuk menemukan waktu pelaksanaan yang tepat; (2) menurunnya motivasi K/L dalam mengikuti kegiatan pembinaan,

setelah adanya informasi bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tidak dilaksanakan pada tahun 2025, (3) ketidaksesuaian alokasi anggaran pelaksanaan PSS dengan kebutuhan K/L, antara lain karena K/L mitra lebih membutuhkan pembinaan terkait penyusunan Metadata dan Standar Data yang narasumbernya berasal dari internal BPS, sehingga anggaran honor narasumber tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Adapun solusi terhadap kendala pada penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dan pendekatan yang lebih intensif dengan K/L, termasuk konfirmasi ulang menjelang pelaksanaan kegiatan, agar pembinaan dapat terlaksana sesuai rencana yang telah disusun bersama.
2. Memperkuat komunikasi strategis bahwa pembinaan PSS tetap penting sebagai bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, meskipun EPSS tidak dilaksanakan.
3. Perlunya penyediaan anggaran pelaksanaan PSS yang lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan K/L, agar kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Rencana tindak lanjut pada penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral adalah melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif agar seluruh jajaran BPS lebih memahami bahwa Pembinaan Statistik Sektoral termasuk kegiatan yang strategis. Selain itu, perlu dibentuk tim Pembina yang memahami secara detail tentang metadata statistik, standar data, dan *quality gate* serta materi pembinaan yang lebih mudah dipahami sehingga K/L mitra lebih mudah menerima materi-materi pembinaan statistik sektoral.

### **3.3.2 Capaian Prioritas Presiden**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan

Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei *Baseline*. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG. Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei *Baseline* dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei *Baseline* adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei *Baseline* pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

Output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan tersebut diantaranya adalah instrumen survei berupa kuesioner dan buku pedoman, moda pencacahan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) dan *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI) melalui aplikasi FASIH, web monitoring, raw data hasil pendataan, serta tabulasi dan analisis hasil pendataan yang dituangkan dalam bentuk *booklet* dan laporan. Output utama dari pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG adalah untuk mengukur dampak Program MBG terhadap gizi dan kesehatan masyarakat, perekonomian, dan ketenagakerjaan. Output kegiatan ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan

tujuan dan standar yang telah ditetapkan, memastikan ketepatan sasaran dan kualitas layanan, serta mengidentifikasi kendala dan praktik di lapangan. Hasil survei ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan program, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas keberlanjutan pelaksanaan Program MBG.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG antara lain penentuan indikator yang digunakan untuk mengukur dampak program MBG, ketidaksesuaian *frame* awal SPPG yang digunakan dalam pencacahan, rendahnya *response rate supplier*, serta padatnya waktu pelaksanaan. Program MBG adalah kebijakan pemerintah yang baru dilakukan di tahun 2025, sehingga masih ditemukan kesulitan dalam menentukan indikator untuk mengukur dampak program ini. Solusi yang dilakukan atas kendala ini adalah melakukan diskusi dan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait serta para pakar yang lebih mengetahui mengenai proses bisnis penyediaan MBG dan pengukuran dampak makan bergizi. Daftar SPPG yang telah beroperasi, yang diterima dari BGN, dijadikan dasar dalam penentuan sampel, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ada beberapa ketidaksesuaian diantaranya ditemukan SPPG yang belum beroperasi di lapangan sehingga perlu dilakukan penggantian sampel. Dampak ekonomi MBG salah satunya diukur melalui pendataan terhadap *supplier* sebagai pemasok bahan baku yang digunakan oleh SPPG. Pendataan terhadap *supplier* dilakukan dengan metode *Computer Assisted Web Interviewing (CAWI)*, dimana responden mengisi sendiri kuesioner secara online. Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan *response rate* dari *supplier* adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *supplier* serta monitoring saat periode pencacahan. Kendala utama terkait masalah administrasi Survei Monev Program MBG adalah keterlambatan anggaran masuk sementara pelaksanaan survei harus tetap dilaksanakan mengingat jadwal yang sudah ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Pelaksanaan Survei Monev Program MBG yang dilaksanakan 2 tahap di tahun 2025, sehingga jadwal pelaksanaan menjadi padat. Salah satu solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan memaksimalkan semua

sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan Survei Money Program MBG berjalan sesuai jadwal.

Sampai saat ini belum ada arahan tindak lanjut dari Pimpinan terhadap keberlanjutan kegiatan ini karena bersifat adhoc. Apabila ada kegiatan lanjutan maka disarankan untuk kegiatan lain selain pendataan SPPG. Pendataan SPPG dapat terintegrasi dengan laman dialur.

### 3.3.3 Capaian Isu Strategi Nasional

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis *System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework*. Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif. Pada tahap pengukuran, dilakukan perhitungan neraca arus energi dan emisi GRK menurut lapangan usaha dan komponen konsumsi akhir. Penyusunan indikator turunan dari neraca terkait seperti bauran energi terbarukan dalam konsumsi akhir, intensitas energi, serta emisi dan intensitas emisi GRK. Pada tahap diseminasi hasil dilakukan baik kepada pemangku kepentingan nasional maupun internasional. Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi kinerja berupa penyusunan publikasi resmi Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia.

Output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan tersebut meliputi rapat atau diskusi, dataset neraca arus dan neraca emisi GRK Indonesia tahun 2019-2023, indikator inti berupa intensitas energi dan intensitas emisi GRK, serta publikasi resmi BPS berjudul Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia 2019-2023 yang dirilis pada Juni 2025. Selain itu juga mendukung *Global Data Collection* terkait Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

Indonesia yang dinaungi oleh *United Nation Statistics Division* (UNSD). Data emisi GRK perkapita juga berkontribusi dalam pengisian kuesioner BRICS. Output ini menjadi dasar penting dalam penyediaan data lingkungan strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Output Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi juga berkontribusi dalam pemenuhan rekomendasi DGI fase 3 untuk rekomendasi 1 dan 2. BPS diundang dalam beberapa pertemuan DGI sebagai pembicara seperti G20 DGI-3 Webinar: *Closing Data Gaps to Better Understand Energy Supply and Use* pada 2 Juni 2025 dan G20 DGI-3 *Global Conference* pada tanggal 17 Juni 2025 untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi di Indonesia.

Dalam prosesnya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala yaitu kendala terkait koordinasi lintas ke deputian dan kementerian/lembaga. Atas kendala tersebut solusi yang dilakukan adalah dengan membangun koneksi serta melakukan koordinasi secara rutin baik dengan internal BPS maupun kementerian/lembaga. Selanjutnya terdapat beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu perbaikan sumber data yang sebelumnya masih bersumber dari dua versi *energy balance* BPS dan KESDM diharapkan tahun depan sudah menjadi satu sumber saja. Adapun rencana aksi lainnya, diantaranya

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan K/L pemangku kepentingan neraca arus energi seperti KESDM, BI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian; maupun K/L pemangku kepentingan neraca emisi GRK seperti KLH, Kementerian Kehutanan; serta lembaga internasional pemangku kepentingan *climate change statistics* seperti UNSD, IMF DGI-3, OECD, BRICS.
2. *Mapping Global Warming Potential* versi AR2 ke AR5 melalui diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup.
3. Memperbaiki metode penghitungan untuk data *international bunkering* dengan bantuan lembaga internasional seperti IMF, OECD, dan IEA dan melibatkan K/L pemangku kepentingan seperti BI, KESDM, Kemenhut, dan KLH.

### 3.4. Prestasi dan Inovasi Direktorat Neraca Produksi

Adapun prestasi DNP yang berhasil diperoleh tahun 2025 adalah penghargaan dari internal BPS atas pencapaiannya dalam kualitas data dan pemanfaatan data tahun 2025 dengan nilai domain kualitas data sebesar 3,21 dan nilai aspek pemanfaatan data statistik sebesar 3,67 dengan predikat berkualitas. Selain itu, penghargaan atas pencapaian dalam pengelolaan arsip juga didapat dari internal BPS dengan nilai audit kearsipan internal tahun 2025 sebesar 93,742 dengan kategori AA (sangat memuaskan).

Selain prestasi, pada tahun 2025, DNP mengembangkan inovasi untuk menunjang pencapaian dan peningkatan kualitas kinerja di DNP. Inovasi yang dikembangkan adalah *Platform for Analytical System and Trend Intelligence (PASTI)*, yaitu sebuah *platform* aplikasi berbasis kecerdasan artifisial yang dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, baik data internal, eksternal, maupun data fenomena, guna menghasilkan informasi analitis yang komprehensif, akurat, dan relevan. PASTI mendukung pelaksanaan analisis data makro ekonomi serta analisis tren secara lebih mendalam dan responsif dalam rangka penyusunan neraca nasional. Melalui pemanfaatan teknologi analitik dan kecerdasan artifisial, *platform* ini memungkinkan proses pengolahan, eksplorasi, dan interpretasi data dilakukan secara lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Aplikasi PASTI mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dan diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam penguatan kualitas analisis statistik. Adapun penerima manfaat dari inovasi ini adalah internal Direktorat Neraca Produksi (DNP) serta BPS secara keseluruhan.

### 3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Direktorat Neraca Produksi

Pagu Program PPIS yang tersedia untuk Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi berdasarkan alokasi anggaran BPS tahun 2025 pada awal tahun adalah sebesar Rp. 3.285.220.000. Tetapi dalam perjalanannya, pada semester kedua, ada penambahan alokasi anggaran Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik untuk Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. Pada posisi akhir tahun 2025, alokasi

anggaran menjadi 20.716.493.000. Penyerapan/realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 (31 Desember) sebesar Rp. 16.548.639.326 atau sebesar 79,88 persen. Tingginya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh perencanaan anggaran yang sudah sejalan dengan aktivitas Direktorat Neraca Produksi.

Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20.716.493.000, Sasaran 1 dialokasikan sebesar 99,77 persen; Sasaran 2 sebesar 0 persen; sementara untuk Sasaran 3 dialokasikan sebesar 0,23 persen. Penyerapan anggaran dari kedua sasaran kegiatan itu (Sasaran 1 dan Sasaran 3) secara rata-rata mencapai 79,88 persen. Adapun Sasaran 2 semua kolomnya terisi nol karena tidak ada pagu anggaran yang dapat digunakan pada tahun 2025 sehingga tidak dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata.

**Tabel 3.4 Tingkat Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan di Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi **)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas								
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	100	100	100	20.669.117.000	16.533.808.526	79,99	1,25
Sasaran 2. Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi								
Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Neraca Produksi yang Menjadi Statistik Resmi	Persen	0	0	0	0	0	0	0
Sasaran 3. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi								
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Neraca Produksi.	Poin	70,51	85,71	121,55	47.376.000	14.830.800	31,30	3,88
<b>Total</b>				<b>110,78</b>	<b>20.716.493.000</b>	<b>16.548.639.326</b>	<b>79,88</b>	<b>1,39</b>

\*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir

\*\*\*) dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%) / Persentase realisasi anggaran 2025 (%)

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila memiliki nilai efisiensi lebih dari 1 persen. Secara total, kegiatan DNP dapat dikatakan efisien karena memiliki nilai efisiensi sebesar 1,39 persen. Hal ini sejalan dengan nilai efisiensi dari masing-masing sasaran kegiatan yang berada di atas 1 persen. Upaya efisiensi tidak hanya kegiatan yang bersifat teknis tetapi termasuk nonteknis. Integrasi survei yang dilakukan sejak tahun 2020 merupakan salah satu upaya efisiensi terkait anggaran dan beban pekerjaan. Realisasi efisiensi lainnya selama tahun 2025 adalah:

1. Efisiensi kertas dimana untuk publikasi tidak lagi dicetak melainkan menggunakan elektronik;
2. Efisiensi listrik didukung dengan minimalisasi kegiatan lembur di luar jam kerja;
3. Efisiensi air didukung dengan minimalisasi kegiatan lembur di luar jam kerja;
4. Efisiensi dana dimana pelatihan survei triwulanan dan tahunan dilakukan secara jarak jauh menggunakan LMS warkop, dan proses rekonsiliasi PDRB dilakukan secara daring.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan kinerja Direktorat Neraca Produksi tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun oleh Direktorat Neraca Produksi (DNP) untuk menuju tata pemerintahan yang baik. Laporan kinerja merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Direktorat Neraca Produksi pada tahun 2025 telah berjalan selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja yang ditetapkan. Secara keseluruhan, DNP berhasil menunjukkan akuntabilitas kinerja yang sangat baik dengan tingkat capaian indikator kinerja yang mayoritas memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari keberhasilan dalam menyediakan data dan *insight* statistik lintas sektor yang berkualitas, serta peningkatan keberhasilan pembinaan statistik sektoral yang mencapai 121,55 persen. DNP telah berperan aktif dalam mendukung agenda strategis nasional, termasuk pelaksanaan survei monitoring dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama pemerintah tahun 2025. Selain itu, penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah diselesaikan tepat waktu sebagai kontribusi pada isu pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang telah disajikan atas pelaksanaan fungsi dan tugas DNP di tahun 2025, Pengelolaan anggaran tahun 2025 tercatat sebesar 79,88 persen dari total pagu setelah adanya penambahan alokasi signifikan untuk mendukung kegiatan prioritas baru di semester kedua. Dari sisi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan anggaran, sarana prasarana, serta dukungan teknologi informasi telah diarahkan secara optimal untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan program. Berbagai langkah efisiensi dan penyempurnaan proses kerja juga dilakukan guna memastikan keluaran yang dihasilkan tetap sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja dan akuntabilitas Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025 dapat dinilai berhasil, baik dari sisi pencapaian sasaran strategis maupun kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

#### **4.2. Rencana Tindak Lanjut**

Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mempertahankan serta meningkatkan performa kinerja di masa mendatang, Direktorat Neraca Produksi merumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Penguatan Koordinasi Eksternal: Meningkatkan intensitas koordinasi dan pendekatan persuasif dengan Kementerian/Lembaga (K/L) mitra guna memastikan ketersediaan data administratif yang tepat waktu dan sesuai standar, terutama untuk indikator Visi Indonesia Emas 2045 yang belum memiliki realisasi di tahun ini.
- b. Digitalisasi dan Efisiensi Proses Bisnis: Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi bantu penerjemahan dan sistem pemantauan berbasis web, untuk mengatasi kendala dalam penyusunan publikasi bilingual serta memastikan sinkronisasi data antar daerah berjalan lebih cepat.
- c. Mitigasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan: Melakukan evaluasi berkala terhadap jadwal kegiatan besar guna menghindari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun, serta memastikan kesiapan perangkat IT pegawai baik milik mandiri maupun Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung fleksibilitas kerja.
- d. Optimalisasi Pembinaan Statistik Sektoral: Melanjutkan pendampingan berkelanjutan kepada K/L mitra untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) secara konsisten, sehingga penyelenggaraan Statistik Nasional menjadi lebih terpadu dan berkualitas.



**HALAMAN  
LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Neraca Produksi

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025, Tanggal 8 September 2025





## Lampiran 2. Rencana Strategis Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025 - 2029

Satuan Kerja : Direktorat Neraca Produksi

Visi : Unit Kerja yang Terpercaya dan Berperan Aktif dalam Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Neraca Produksi untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Pemerintah Berbasis Data


Misi : 

1. Menyediakan Data dan *Insight* dan Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas
2. Meningkatkan Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Berkualitas

Tujuan : 

1. Mewujudkan Pemanfaatan Data dan *Insight* Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas Sebagai Dasar Bagi Perumusan Kebijakan Publik.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi Sesuai Standar.

Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Lintas Sektor yang berkualitas	1.1. Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	<p>Strategi-strategi yang dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan proses identifikasi kebutuhan data (<i>specify needs</i>).</li> <li>2. Melakukan identifikasi relevansi data terhadap pengguna.</li> <li>3. Meningkatkan akurasi data-data yang dihasilkan.</li> <li>4. Melakukan penjaminan aktualitas data.</li> <li>5. Mempublikasikan buku/laporan dengan tepat.</li> <li>6. Menyajikan data disertai dengan metadata dan petunjuk teknis.</li> <li>7. Menyebarluaskan data-data yang dihasilkan dan dapat diakses</li> </ol>	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).



Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dengan mudah oleh pengguna dalam berbagai format sesuai kebutuhan.</p> <p>8. Menyajikan data yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah.</p> <p>9. Melakukan penjaminan konsistensi statistik.</p> <p>10. Memanfaatkan data statistik dasar dan statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan.</p> <p>11. Melakukan sosialisasi output yang dihasilkan kepada publik.</p>	

Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi	2.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas pegawai DNP sebagai pembina statistik sektoral.</li> <li>2. Melakukan pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra DNP.</li> <li>3. Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dan pendekatan persuasif ke Kementerian/Lembaga mitra DNP.</li> </ol>	

### Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Unit Eselon II	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang berkualitas	Direktorat Neraca Produksi	1.1. Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	100
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi	Direktorat Neraca Produksi	2.1. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi	Poin	70,51

#### Lampiran 4. Perjanjian Kinerja dan Tingkat Pencapaian Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Unit Eselon II	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang berkualitas	Direktorat Neraca Produksi	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	100	100	100
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi	Direktorat Neraca Produksi	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi	Poin	70,51	85,71	121,55

Lampiran 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Neraca Produksi Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan Januari 2025

No.	Jabatan Umum/Fungsional	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Direktur Neraca Produksi	0	1	0	0	0	0	0	1
2	Pejabat Fungsional Statistisi Madya	0	11	0	0	0	0	0	11
3	Pejabat Fungsional Statistisi Muda	0	18	8	0	0	0	0	26
4	Pejabat Fungsional Statistisi Pertama	0	1	18	0	0	0	0	19
5	Pejabat Fungsional Arsiparis Terampil	0	0	0	1	0	0	0	1
6	Pelaksana	0	1	5	0	0	0	0	6
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>

Lampiran 6. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Neraca Produksi Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan Desember 2025

No.	Jabatan Umum/Fungsional	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Direktur Neraca Produksi	0	1	0	0	0	0	0	1
2	Pejabat Fungsional Statistisi Madya	1	10	0	0	0	0	0	11
3	Pejabat Fungsional Statistisi Muda	0	17	8	0	0	0	0	25
4	Pejabat Fungsional Statistisi Pertama	0	1	17	0	0	0	0	18
5	Pejabat Fungsional Arsiparis Terampil	0	0	0	1	0	0	0	1
6	Pelaksana	0	3	4	0	0	0	0	7
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>

Lampiran 7. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Neraca Produksi Menurut Pangkat Golongan dan Jenjang Pendidikan Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pembina Utama Madya / IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1
2	Pembina Utama Muda / IV/c	0	1	0	0	0	0	0	1
3	Pembina Tingkat I / IV/b	1	6	0	0	0	0	0	7
4	Pembina / IV/a	0	5	0	0	0	0	0	5
5	Penata Tingkat I / III/d	0	10	3	0	0	0	0	13
6	Penata / III/c	0	10	7	0	0	0	0	17
7	Penata Muda Tingkat I / III/b	0	0	13	0	0	0	0	13
8	Penata Muda / III/a	0	0	5	0	0	0	0	5
9	Pengatur Muda Tingkat I / II/c	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>

## Lampiran 8. Daftar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Target Pembinaan Tahun 2025

No.	Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
(1)	(2)
1	Mahkamah Agung RI
2	Komisi Pemilihan Umum RI
3	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI
4	Lembaga Ketahanan Nasional RI
5	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI

## Lampiran 9. Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025

### Meraih Penghargaan Penilaian Statistik Berkualitas BPS dengan Predikat “Berkualitas”

Direktorat Neraca Produksi berhasil meraih Penghargaan Penilaian Statistik Berkualitas BPS dengan predikat “Berkualitas”, sebagai wujud komitmen dalam menyelenggarakan statistik yang andal, akurat, dan sesuai standar. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas proses statistik, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu data neraca produksi guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.



**Meraih Penghargaan Pengelolaan Arsip BPS dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan).**

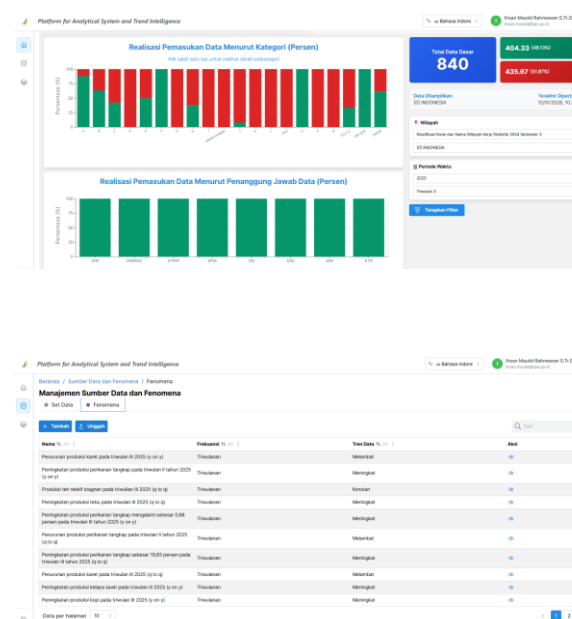
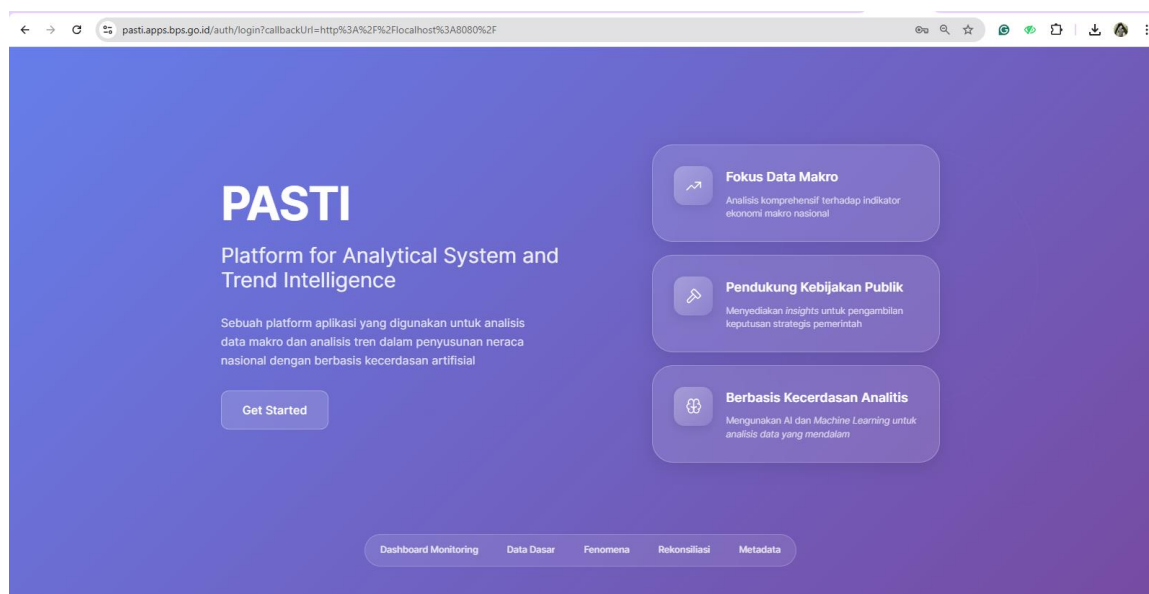
Direktorat Neraca Produksi berhasil meraih Penghargaan atas Pencapaian dalam Pengelolaan Arsip dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 93,742 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan).



## Lampiran 10. Daftar Inovasi Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025

### Platform for Analytical System and Trend Intelligence (PASTI)

PASTI merupakan sebuah *platform* aplikasi yang digunakan untuk analisis data makro dan analisis tren dalam penyusunan neraca nasional dengan berbasis kecerdasan artifisial. Platform ini dikembangkan oleh Direktorat Neraca Produksi melalui kolaborasi dengan Direktorat Sistem Informasi Statistik.



## Lampiran 11. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun 2025

Kegiatan/Output	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2897. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	1.1 Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	100	100	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik  Anggaran Direktorat Neraca Produksi tahun 2025  Rp. 20.716.493.000,-  (sesuai anggaran program yang ada pada DIPA) posisi Desember 2025
2899. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi						

Lampiran 12. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat Neraca Produksi Tahun Anggaran 2025

Kegiatan/ Output	Komponen	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>2897.</b> Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	<b>2897</b>	<b>Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik</b>	<b>17.431.273.000</b>	<b>13.478.734.136</b>	<b>77,33</b>
	2897.BMA	Data dan Informasi Publik	17.431.273.000	13.478.734.136	77,33
	2897.BMA.004	Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	17.431.273.000	13.478.734.136	77,33
	2897.BMA.004.055	Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan (PNBP)	17.431.273.000	13.478.734.136	77,33
	2897.BMA.004.055.D	Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis	17.431.273.000	13.478.734.136	77,33
<b>2899.</b> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	<b>2899</b>	<b>Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi</b>	<b>3.285.220.000</b>	<b>3.069.905.190</b>	<b>93,45</b>
	2899.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	47.376.000	14.830.800	31,30
	2899.BDB.100	PELAKSANAAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL	47.376.000	14.830.800	31,30
	2899.BMA	Data dan Informasi Publik	3.237.844.000	3.055.074.390	94,36

Kegiatan/ Output	Komponen	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	<b>2899.BMA.006</b>	<b>PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI</b>	<b>3.211.788.000</b>	<b>3.031.056.652</b>	<b>94,37</b>
	51	Persiapan	0		
	52	Pengumpulan Data	1.223.728.000	1.158.801.232	94,69
	53	Pengolahan dan Analisis	1.988.060.000	1.872.255.420	94,17
	54	Diseminasi dan Evaluasi	0		
	<b>2899.BMA.009</b>	<b>PUBLIKASI/ LAPORAN NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL (TSA)</b>	<b>26.056.000</b>	<b>24.017.738</b>	<b>92,18</b>
	51	Persiapan	6.800.000	5.400.000	79,41
	52	Pengumpulan Data	19.256.000	18.617.738	96,69
	53	Pengolahan dan Analisis	0		
	54	Diseminasi dan Evaluasi	0		
	<b>TOTAL</b>		<b>20.716.493.000</b>	<b>16.548.639.326</b>	<b>79,88</b>



**BADAN PUSAT STATISTIK**



(021) 3841195, 3842508 Fax: (021) 3857046



Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta, 10710



<http://www.bps.go.id>



[bpshq@go.id](mailto:bpshq@go.id)